

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DI PUSKESMAS PEMBANTU DI DESA BUANAMEKAR KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS

Oleh

EUIS AULIYA

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih belum optimal.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kesehatan

PENDAHULUAN

Kebijakan merupakan produk hukum yang di buat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, dalam memahami hal tersebut maka pemerintah daerah membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Dengan tujuan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah dan harus mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sehingga dapat menunjang proses pembangunan daerah secara menyeluruh dengan sumber daya manusia yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat memungkinkan orang dapat hidup produktif dilingkungan sosial dan ekonomis.

Hasil observasi langsung ke lapangan dan penulis menemukan masalah dalam penyelenggaraan kesehatan, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 seharusnya Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan namun pada kenyataannya Puskesmas Pembantu tersebut sempat tutup selama 4 bulan pada

tahun 2014 karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sebagai penyelenggara kesehatan.

2. Kurangnya minat masyarakat berobat akibat kurangnya ketersediaan penunjang kesehatan seperti obat-obatan.
3. Tidak adanya Dokter jaga di Puskesmas Pembantu sebab tenaga kesehatan yang ada hanya 2 yaitu bidan dan perawat.

Penelitian ini mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang di hadapi Puskesmas Pembantu dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, di Puskesmas

Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis?

TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan suatu masalah atau persoalan tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Anderson (Wibawa, 2011:2) berpendapat, bahwa kebijakan adalah 'Arah tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah'. Dengan demikian kebijakan ini sebaiknya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Sementara itu mengenai pengertian kebijakan publik menurut pendapat Nasucha (Pasolong, 2010:39) adalah sebagai berikut :

Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2012:139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut:

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan implementasi kebijakan, adalah serangkaian aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam melaksanakan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terhadap sasaran dari kebijakan yaitu masyarakat secara umum sehingga dapat diketahui hasilnya melalui sikap dari sasaran kebijakan itu sendiri yang berupa

sikap menerima atau menolak atas adanya kebijakan tersebut.

Unsur- unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada menurut Smith (Tachjan, 2006: 26) Winda Nurdiawati, 2010 adalah :

Unsur pelaksana (Implementasi), adanya program yang akan dilaksanakan, kelompok sasaran (target group).

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan.

2. Program

Menurut Terry (Tachjan, 2006:31) mengemukakan bahwa : Program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran kebijakan prosedur, metode, standar, dan budget.

3. Target Group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Menurut Edwards III (Agustino, 2012:149) mengemukakan bahwa terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada pasal (1) poin 7 dijelaskan bahwa Kesehatan adalah "Keadaan dimana setiap orang yang secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dinyatakan sehat sehingga dapat memungkinkan orang dapat hidup produktif dilingkungan sosial dan ekonomis".

Strategi penyelenggaraan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan pasal 165 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan dilakukan dengan strategi :

- a. Pelaksanaan koordinasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan

- untuk membangun sinergitas pembangunan kesehatan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kesehatan yang kondusif, efektif dan bermutu.
 - c. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses kesehatan, peningkatan mutu, peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan kesehatan.
 - d. Penggalan dan pemberdayaan seluruh potensi internal maupun eksternal guna menghasilkan penyelenggaraan kesehatan yang efektif dan produktif; dan
 - e. Peningkatan kinerja dan profesionalisme tenaga kesehatan serta institusi kesehatan melalui pemberian kesejahteraan dan penghargaan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2012:9) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif ini diartikan sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Adapun lamanya penelitian serta penyusunan skripsi adalah selama 6 bulan, yaitu pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015.

1. Subjek Penelitian

a. Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan-ungkapan, kata-kata dan kalimat.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sumber data

yang akan di wawancara adalah sebanyak 8 informan.

2. Prosedur

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan
- b. Studi lapangan, yang terdiri dari :
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu :

- 1) Reduksi data,
- 2) Penyajian data,
- 3) Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis harus memperhatikan faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan seperti yang dikemukakan Edwards III (Agustino, 2012 : 149), yaitu :

- 1) Komunikasi
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

Dengan demikian, dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Edward III (Agustino, 2012:149-153) berpendapat, bahwa terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan faktor komunikasi salah satunya yaitu:

Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu

implementasi yang baik pula. Sering kali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut dibagikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Adanya penyaluran komunikasi berupa sosialisasi penyelenggaraan kesehatan seperti adanya pelaksanaan program posyandu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis. Serta adanya partisipasi dari sebagian masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III (Agustino, 2012:149-153) bahwa indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen salah satunya yaitu:

Staf, merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan publik. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan publik salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan publik atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Adanya keterbatasan tenaga kesehatan hanya 2 (dua) orang itupun pegawai tidak tetap dan sukwan, kemampuan tenaga kesehatan yang masih kurang seperti masih adanya kesalahan dalam pemeriksaan, peralatan kesehatan masih kurang seperti obat-obatan, nebo dan fasilitas penunjang lainnya seperti kurangnya air bersih serta bangunan Puskesmas yang mulai rusak.

3. Disposisi Pelaksana

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2012:144) bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya yaitu:

Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil

apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

Sikap dan kejujuran pegawai kesehatan cukup baik terlihat dari sikapnya yang ramah dan bisa menjaga rahasia pasien, tetapi dari kesungguhan pegawai kesehatan sebagai pelaksana kebijakan kurangnya, terlihat dari ketidak keseriusan pegawai kesehatan sehingga datang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahkan terkadang Puskesmas Pembantu tidak buka, sehingga menghambat kelancaran dalam penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Siagian (Tachjan, 2006:27-28) bahwa unsur pelaksana bertugas :

Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang memiliki unit birokrasi maka ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari penentuan tujuan dan sasaran, analisis serta perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, penilaian program.

Adanya keterlibatan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan mulai dari adanya koordinasi antar UPTD Kesehatan Puskesmas Payungsari kepada pegawai kesehatan Puskesmas Pembantu serta pemerintah setempat guna kelancaran penyelenggaraan kesehatan, adanya transparansi mengenai penyelenggaraan kesehatan, dan adanya dukungan berupa dana untuk pembangunan halaman di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Puskesmas Pembantu dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil observasi, maka dapat diketahui adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Pembantu di Desa

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
EUIS AULIYA

Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan untuk dimensi komunikasi, terlihat bahwa sebagian masyarakat masih belum mengerti dan paham tentang penyelenggaraan kesehatan jadi partisipasi masyarakat di Desa Buanamekar masih rendah. Serta masalah waktu dalam penyaluran komunikasi kepada masyarakat, dimana dalam hal ini waktu yang dimiliki masyarakat berbenturan dengan aktifitas masyarakat sehari-hari seperti pergi ke kebun.

Dalam dimensi komunikasi tidak terdapat hambatan terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program posyandu di setiap dusun di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

2. Sumber Daya

Adapun hambatan dalam dimensi sumberdaya yaitu peralatan kesehatan yang masih terbatas seperti obat-obatan, selain itu fasilitas yang tersedia pun kurang memadai seperti kurangnya fasilitas air bersih dan fasilitas penunjang yang mulai rusak seperti bangunan Puskesmas.

3. Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwa terlihat masih kurangnya kesungguhan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas Pembantu terlihat dari Puskesmas Pembantu yang sering tutup serta pegawai sering datang terlambat.

4. Struktur birokrasi

Masih kurang transparan dan masih bersifat relatif karena informasi kesehatan yang hanya dapat diakses diinternet, sehingga tidak semua masyarakat dapat mengetahui informasi kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kurangnya komunikasi antara Puskesmas dengan pemerintah desa seperti tidak adanya informasi kepada UPTD Kesehatan Puskesmas Payungsari Kesehatan mengenai tutupnya Puskesmas Pembantu sehingga tidak tindak lanjut terhadap masalah tersebut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, maka dapat diketahui adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

1. Komunikasi

Adapun upaya yang dilakukan pegawai kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program posyandu dalam rangka penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas Pembantu yaitu dari pihak Puskesmas Pembantu mengkoordinasikan atau meminta bantuan kepada pihak desa setempat untuk mengajak masyarakat secara langsung melalui RT/RW supaya masyarakat tahu dan hadir dalam pelaksanaan program posyandu di lingkungannya masing-masing.

2. Sumber Daya

Untuk mengatasi hambatan dalam dimensi sumberdaya dalam indikator peralatan kesehatan, adapun upaya yang dilakukan oleh UPTD Kesehatan Puskesmas Payungsari sebagai Puskesmas induk untuk mengatasi keterbatasan peralatan di Puskesmas Pembantu yaitu dengan mengajukan proposal bantuan peralatan kepada Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan kesehatan, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam fasilitas yaitu dengan Pengajuan dana melalui Musrenbang dari pemerintah desa untuk pembangunan atau perbaikan Puskesmas Pembantu ke kecamatan yang nantinya diajukan ke kabupaten.

3. Disposisi Pelaksana

Untuk mengatasi hambatan untuk meningkatkan kesungguhan pegawai supaya bekerja dengan sungguh-sungguh salah satunya dengan adanya insentif yang diberikan dengan tujuan untuk mendorong para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah ataupun tugasnya dengan baik.

4. Struktur birokrasi

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam dimensi struktur birokrasi

dalam indikator transparansi yaitu memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat seperti adanya laporan hasil kegiatan di Puskesmas Pembantu yang di pajang di papan informasi serta adanya laporan mingguan dan bulanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada awal penulis melakukan pengumpulan data, pengolahan data dan sampai pada analisis data dalam penelitian ini kemudian penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis sudah berjalan tetapi belum maksimal, terlihat dari keterbatasan tenaga kesehatan mulai dari tenaga tidak tetap dan sukwan, keterbatasan fasilitas maupun peralatan kesehatan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kesehatan, kurangnya kesungguhan pelaksana terlihat dari sering telat datang ke Puskesmas Pembantu, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan masih kurang optimal kemampuan yang dimiliki oleh pegawai kesehatan seperti masih adanya kesalahan dalam pemberian pelayanan.
2. Mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yaitu: Keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi, kurangnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat seperti halnya keikutsertaan dalam kegiatan program Posyandu, keterbatasan peralatan kesehatan, keterbatasan kemampuan sumberdaya penyelenggara kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan sebagai penunjang kelancaran dalam penyelenggaraan kesehatan, kurangnya kesungguhan pegawai kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan, keterbatasan akses informasi mengenai penyelenggaraan kesehatan, kurangnya koordinasi serta

komunikasi antara penyelenggara kesehatan dengan pemerintah.

3. Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yaitu: Adanya jadwal kegiatan yang jelas yang di buat oleh tenaga kesehatan demi kelancaran dalam penyelenggaraan kesehatan, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan seperti pelaksanaan program posyandu dari Puskesmas Pembantu mengkoordinasikan pihak setempat untuk mengajak masyarakat secara langsung melalui RT/RW supaya masyarakat tahu dan hadir dalam pelaksanaan program posyandu, adanya pengajuan proposal bantuan peralatan kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, dengan adanya pendidikan serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan, pengajuan dana melalui Musrenbang dari pemerintah desa untuk pembangunan atau perbaikan Puskesmas Pembantu ke kecamatan yang nantinya diajukan ke kabupaten, upaya yang dilakukan dengan pemberian insentif kepada pegawai supaya pegawai kesehatan lebih bersungguh-sungguh dalam menyelenggarakan kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, adanya informasi yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat seperti dengan adanya brosur kesehatan atau tertera informasi dalam papan pengumuman, koordinasi dan komunikasi antar sektor pemerintah harus lebih ditingkatkan lagi.

Saran

Melihat dari kesimpulan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya, kemudian penulis dapat mengemukakan beberapa saran atau rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
EUIS AULIYA

Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Puskesmas Pembantu di Desa Buanamekar Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, pelaksana kebijakan baiknya didukung dengan adanya jadwal kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sumber daya manusia yang memiliki kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan, fasilitas dan peralatan yang memadai, kesungguhan para pelaksana, adanya keterbukaan informasi serta mudah di akses oleh masyarakat secara umum selain berbasis teknologi ada juga informasi yang di pajang di papan informasi, serta komunikasi dan koordinasi antar pemerintah sektor.
2. Sebaiknya ada jadwal kegiatan, kerjasama dengan tokoh masyarakat setempat untuk membantu menginformasi mengenai penyelenggaraan kesehatan supaya masyarakat ikut berpartisipasi, mengupayakan peralatan serta fasilitas kesehatan supaya lebih memadai, kemampuannya pelaksana melalui pendidikan serta pelatihan, kesungguhan pelaksana guna kelancaran dalam pelaksanaan, media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat dan pembagian kerja dengan pemerintah lebih ditingkatkan lagi seperti koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan penyelenggara kesehatan harus terjalin baik.
3. Adanya jadwal kegiatan yang jelas, kerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemenuhan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia yang memadai serta berkompeten, peralatan dan fasilitas, kesungguhan dari pelaksana kebijakan serta peningkatan pengelolaan media atau saluran komunikasi selain dari itu, serta adanya komunikasi dan koordinasi antar sektor pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Islamy, M. Irfan. 2014. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Mandar Maju
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahab, Solichin Abdul. 2010. *Analisis kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Purwanto & Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis
- Profil UPTD Kesehatan Puskesmas Payungsari Kabupaten Ciamis Tahun 2014

